

# KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KULON PROGO, REALISASI JANJI KAMPANYE BUPATI HASTO WARDOYO DI TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN PERIODE KE DUA

SL. Harjanta<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Widya Mataram, Yogyakarta  
[harjantosulis@gmail.com](mailto:harjantosulis@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines the realization of the promise of the Kulon Progo regional leader pair Hasto Wardoyo-Sutedjo. During the 2017 election campaign, the incumbent couple was quite prominent in campaigning for the success of the poverty alleviation program. The success of the poverty program during the previous administration, finally succeeded in delivering Hasto-Tedjo to maintain the seat of regent and vice regent of Kulon Progo. Specifically, this research focuses on how to implement a home surgery program. Home renovation is one of the salient poverty reduction programs carried out by Regent Hasto Wardoyo. This program is quite popular because there are still many Kulon Progo residents who inhabit unfit homes. Another interesting thing is that the funding of this program does not rely on the APBDes, APBD or APBN. However, sourced from private companies and BUMD CSR. In addition, the house renovation program is also funded by the zakat of civil servants managed by Bazda Kulon Progo. Despite having made a number of anti-poverty programs, the number of poor people in Kulon Progo is still quite high. Based on BPS data for 2017, the poverty rate is 21 percent. This poverty rate is still relatively high. Compared to the previous year, the poverty rate only fell around 0.3 percent.*

**Keywords:** *Policy, Poverty Alleviation and Realization of Campaign Promises.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji bagaimana realisasi janji pasangan pemimpin daerah Kulon Progo, Hasto Wardoyo-Sutedjo. Dalam masa kampanye Pilkada tahun 2017 lalu, pasangan petahana ini cukup menonjol dalam mengkampanyekan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan program kemiskinan di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya sukses mengantarkan Hasto-Tedjo mempertahankan kursi bupati dan wakil bupati Kulon Progo. Secara khusus, dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana implementasi program bedah rumah. Bedah rumah adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang cukup menonjol yang dilakukan Bupati Hasto Wardoyo. Program ini cukup populer karena masih banyaknya warga Kulon Progo yang menghuni rumah tidak layak. Yang menarik lainnya, pembiayaan program ini tidak mengandalkan APBDes, APBD maupun APBN. Namun, bersumber dari CSR perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu, program bedah rumah juga dibiayai dari zakat PNS yang dikelola Bazda Kulon Progo. Kendati sudah membuat sejumlah program anti kemiskinan, jumlah warga miskin di Kulon Progo masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2017, angka kemiskinan sebesar 21 persen. Angka kemiskinan ini relatif masih tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan hanya turun sekitar 0,3 persen.

**Kata kunci:** Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Janji Kampanye

## LATAR BELAKANG

Seperti prediksi awal, pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo unggul dalam Pilkada Kulon Progo tahun 2017. Tak hanya sekedar unggul, pasangan inkumben ini bisa dikatakan mendapat dukungan suara mutlak. Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Kulon Progo, Hasto-Tejo mendapat suara 85 persen. Sedangkan lawannya, Zuhadmono Azhari-Iriani Pramestuti mendapatkan suara 14 persen.

**Tabel. 1**  
**Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Berdasar Rapat Pleno KPU**

Pasangan Calon	Parpol Pengusung	Suara	%
Zuhadmono Azhari-Iriani Pramestuti	Gerindra, Demokrat, dan PKB	36.874	14,4 %
Hasto Wardoyo-Sutejo	PDI Perjuangan, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura	220.643	85,6 %

Sumber : Data Diolah dari KPU Kulon Progo dan Sumber Lain

Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Kulon Progo, pasangan Hasto-Tedjo unggul di di seluruh Kecamatan. Jumlah kecamatan di Kulon Progo sendiri sebanyak 12. Beberapa kecamatan yang suaranya berhasil disapu bersih antara lain Kecamatan Kokap, Temon, Naggulan dan Sentolo.

Dalam perhelatan Pilkada tahun 2017 pasangan Hasto-Tedjo mendapat sokongan koalisi besar partai politik. Setidaknya ada enam partai politik yang mendukung pasangan incumbent ini. Enam partai politik itu adalah PDI Perjuangan, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Gabungan enam partai ini juga memiliki kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dari total 40 kursi, koalisi parpol pendukung Hasto-Tedjo menguasai 27 kursi parlemen. Kendati disokong banyak partai, bukan jaminan seorang kandidat kepala daerah bisa memenangkan Pilkada. Ini juga yang disadari oleh Hasto. Untuk itu, dalam strategi pemenangan persaingan Pilkada, kader PDI Perjuangan ini tidak menempatkan parpol sebagai mesin utama kemenangan.

Seperti di banyak daerah, faktor kunci kemenangan Pilkada lebih pada figur kandidat, bukan seberapa banyak dukungan partai politik. Menyadari hal itu, Hasto kemudian membuat strategi kampanye yang efektif. Dalam masa-masa kampanye, dia lebih banyak melakukan tatap muka langsung pada pemilih. Cara *door to door* ini diyakini lebih efektif untuk meyakinkan pemilih. Selama masa

kampanye, dalam sehari Hasto dapat bertatap muka di 15 lokasi. Meski efektif, cara bertemu dengan kelompok kecil pemilih ini juga punya kekurangan. Ini tak lepas dari wilayah Kabupaten Kulon Progo yang cukup luas. Dari wilayah satu hingga wilayah lain bisa berjarak puluhan kilo meter. Misalkan Kecamatan Galur dengan Kecamatan Samigaluh memiliki jarak hingga 80 kilo meter. Dengan begitu, tak bisa seluruh wilayah bisa terjangkau dengan strategi kampanye ini.

Namun lepas dari itu semua, kunci utama kemenangan pasangan Hasto-Tedjo, karena berhasil meyakinkan pemilih saat masa kampanye. Selama masa kampanye, kader PDIP itu memamerkan keberhasilan sejumlah program anti kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut telah dilakukan pada masa pemerintahan periode pertama. Beberapa program anti kemiskinan yang 'dijual' saat masa kampanye antara lain, program bedah rumah. Ada dua skema dalam program perbaikan rumah tidak layak huni ini. Pertama melalui pemerintah pusat dengan sumber pendanaan APBN. Dan ke dua, melalui kerjasama pihak swasta serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu di bidang ekonomi, ada beberapa program populis yang dikembangkan. Beberapa program antara lain, Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Beras Daerah (Rasda). Program ini berkaitan dengan jaringan minimarket swasta berskala lokal maupun nasional yang mulai mengekspansi seluruh wilayah di Indonesia. Tak terkecuali di kabupaten Kulon Progo, minimarket seperti Alfamart dan Indomart telah menanamkan akarnya di hampir semua wilayah. Keberadaannya yang sering bersinggungan dengan toko maupun pasar rakyat, sering menimbulkan kecemburuan bagi para pedagang dan pelaku usaha. Hal ini disebabkan modal yang besar membuat mereka mudah menentukan lokasi strategis, fasilitas, kelengkapan produk, hingga kenyamanan berbelanja secara maksimal.

Sementara itu untuk program beras daerah (Rasda), beras tidak didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, melainkan hasil para petani lokal Kulon Progo. Menurut Hasto Wardoyo istilah beras untuk Rakyat Miskin sungguh menyakitkan. Hal ini karena saat itu berasnya banyak diimpor dari Vietnam dan India. Beras impor ini lama di perjalanan dan karenanya lama disimpan dan menjadi berbau apek.

Satu lagi program populis di bidang ekonomi yakni membangkitkan batik lokal Kulon Progo. Kulon Progo memiliki motif batik yang khas, yakni batik geblek renteng. Melalui kebijakan bela beli, industri batik geblek renteng menjadi meningkat pesat. Sebelumnya, produksi batik geblek renteng di Kecamatan Lendah hanya berkisar 40 ribu yard. Namun saat ini sudah melanjak pesat mencapai 200 ribu yard. Batik geblek renteng tak hanya jadi kebanggaan warga lokal, tetapi produknya juga dipakai oleh warga setempat. 80 ribu pelajar, 8000 PNS, 4000 pamong, kini menggunakan batik geblek renteng. Dengan begitu, ada 90 ribu orang yang menjadi pelanggan tetap batik geblek renteng.

Dari paparan di atas maka peneliti ingin meneliti Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo, sebagai Realisasi Janji Kampanye Bupati Hasto Wardoyo Di Tahun Pertama Pemerintahan Periode Ke Dua. Dengan tujuan untuk melihat apakah kebijakan yang di tetapkan telah di implementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif atau tidak bagi Kabupaten Kulon Progo.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dan permasalahan. Merujuk Moleong 2015 : 11, laporan penelitian deskriptif berisi kutipan data atau memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan setiap bagian ditelaah satu demi satu. Masih merujuk pada ahli yang sama, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana di mana, di kabupaten tersebut terdapat 12 kecamatan. Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang akan menjadi informan kunci. Antara lain : Kepala Daerah atau Bupati Kulon Progo (1 orang), Anggota DPRD Kulon Progo (2 orang).

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dihimpun baik data yang bersifat numeric atau kuantitatif maupun kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data akan diolah dengan analisa yang bersifat induktif dengan pendeskripsian. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Sugiyono,

2011 : 13, bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam riset secara khusus mengkaji program bedah rumah sebagai kebijakan anti kemiskinan yang juga menjadi bagian kampanye Hasto Wardoyo-Sutedjo dalam Pilkada Kulon Progo tahun 2017 lalu. Selama masa kampanye, program bedah rumah sering didengungkan sebagai salah satu program yang berhasil saat bupati Hasto memimpin Kulon Progo pada periode pertama. Selama lima tahun pertama kepemimpinan Bupati Hasto, sekitar 6.000 rumah sudah direnovasi.

Budihardjo (2009) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau harus dijalankan, serta untuk mereka yang sangat tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002).

Sementara itu, berdasar album kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, jumlah warga miskin tahun 2015 mencapai lebih dari 20 persen atau sekitar 50 ribu penduduk. Dari puluhan ribu warga miskin tersebut, sebagian besar tinggal di rumah tidak layak huni. Program bedah rumah memang lazim dilakukan banyak kepala daerah di Indonesia. Yang membuat beda, program di Kulon

Progo tak sepenuhnya dibiayai oleh APBN/ APBD maupun APBDes namun juga pihak di luar pemerintah.

Berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKP-AMJ) 2011-2016, Pemkab Kulon Progo tercatat telah melakukan bedah rumah sebanyak 696 unit. Yang menarik, dalam memperbaiki 696 rumah itu, program ini berhasil menyerap dana swadaya masyarakat sebanyak Rp13,96 miliar. Sementara itu bantuan stimulant (APBD) yang dikeluarkan sebanyak Rp6,96 miliar.

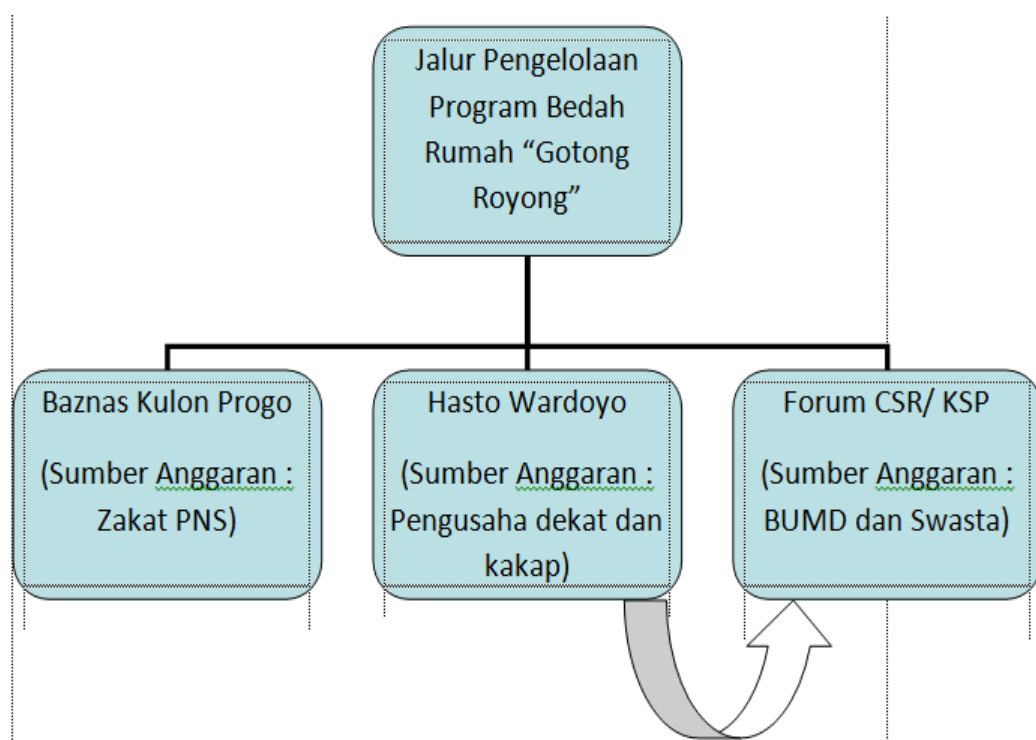
Merujuk hasil riset Wawan Mas'udi dan Nanang Indra pada tahun 2017 dengan judul *Programmatic Politics Shapes Voters Preference : Kulon Progo Election 2017*, program ini diawali dengan pendataan keluarga dan penduduk miskin, yang hasilnya dikemas dalam bentuk album kemiskinan Kabupaten Kulonprogo 2011. Album tersebut berisi daftar detail nama, alamat, profil rumah dan penyebab kemiskinan yang dialami warga Kulon progo. Informasi tersebut kemudian dipakai oleh Bupati Hasto untuk menggerakkan solidaritas sosial dan menghimpun anggaran masyarakat (*crowd funding*), untuk kemudian digunakan membiayai house upgrading.

Rumah tangga yang menjadi target program akan memperoleh subsidi 10 juta rupiah, dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh komunitas. Sejak tahun lalu, nilai bantuan tersebut ditingkatkan menjadi Rp15 juta tiap rumah. Komunitas dimana rumah target akan direnovasi akan membentuk komite kecil untuk memobilisi sumber daya lokal. Program bedah rumah dilaksanakan setiap hari minggu, di mana Bupati dan donator renovasi rumah biasanya akan hadir menyerahkan donasi. Setiap minggunya, ada sekitar 4-14 rumah yang direnovasi. Selama lima tahun pertama kepemimpinan Bupati Hasto, sekitar 6.000 rumah sudah direnovasi.

Sementara itu, berdasar data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemda Kulon Progo, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017 baru mencapai 90,74 persen dan cakupan layanan rumah layak huni terjangkau yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 70 persen pada tahun 2017 baru mencapai 30, 35 persen. Sedangkan penanganan lingkungan sehat perumahan telah berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9.422 unit rumah dari total rumah 112.038

rumah di tahun 2017. Perbaikan rumah tidak layak huni tersebut melalui program yang melibatkan lintas sektoral.

Berdasar data di lapangan, ada tiga skema dalam pelaksanaan program bedah rumah 'gotong-royong' ini. Pertama bedah rumah yang dilakukan oleh Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Kedua melalui Bazas Kulon Progo dan ketiga langsung melalui Hasto Wardoyo.



Bagan. 1  
Skema Pengelolaan Program Bedah Rumah "Gotong royong"

Namun, Bupati Hasto memiliki istilah lain dalam menyebut dana swadaya masyarakat ini dengan menyebutnya sebagai dana 'gotong-royong'. Dana 'gotong-royong' berasal dari beberapa sumber. Diantaranya, keutungan dari rekanan (kontraktor) dan sumbangan 2,5 persen dari gaji PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Selain dua sumber itu, dana program bedah rumah juga berasal dari pihak-pihak lain. Dalam setahun, Hasto menyebut zakat PNS dapat terkumpul hingga mencapai Rp 270 juta.

"Program gotong royong jadi magnet pemerintah pusat buat Kulon Progo. Kita membangun ideologi. Tidak Cuma mbangun rumah. Ada dampak ikutannya, yakni

kepedulian dan semangat gotong royong. Makna bedah rumah ada gotong royong. Kemiskinan bisa diatasi dengan idologi Pancasila.” (Wawancara Hasto Wardoyo, 29/3/2018). Sedangkan dana yang berhasil dihimpun oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kulon Progo, berhasil menghimpun dana cukup besar. Pada tahun lalu, anggaran yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp1 M.

**Tabel. 2**  
**Penyumbang Dana TSP Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jumlah Dana TSP (RP)</b>
1.	Gapensi/Gapeksindo, Gapeknas	207.700.000
2.	PD. BPR. Bank Pasar KP	292.352.475
3.	PT. Selo Adikarto	163.452.704
4.	PDAM Tirta Binangun	78.000.000
5.	Perum Aneka Usaha Kulon Progo	17.902.540
	<b>Jumlah</b>	<b>859.407.719</b>

Sumber : Forum CSR/ TSP Kulon Progo

Dana yang berhasil dihimpun Forum CSR itu sebagian besar digunakan untuk program bedah ruman. Sementara itu, kalangan DPRD mengakui jika program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Bupati Hasto Wardoyo cukup baik. Hal tersebut tercermin, baik dalam APBD maupun RPJMD. Pihak legislatif juga mengakui, DPRD Kulon Progo juga dilibatkan eksekutif dalam pembahasan program anti kemiskinan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Akhid Nuryati dan Priyo Santoso, secara terpisah. Akhid mengatakan, Bupati Hasto cukup inovatif dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Inovatif yang dimaksud politisi PDIP ini adalah terkait pendanaan program anti kemiskinan, khususnya bedah rumah yang tidak berasal dari APBD. Seperti diketahui, program bedah rumah di Kulon Progo juga melibatkan pihak swasta dan juga bersumber dari zakat PNS.

“Dalam program bedah rumah, apa yang dilakukan bupati cukup inovatif. Tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga berasal dari kalangan swasta. Selama ini, kami sering dilibatkan dalam pembahasan, baik formal maupun informal.” (Wawancara Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati). Kendati begitu, kalangan DPRD juga melihat ada sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Beberapa permasalahan itu antara lain, dana terbatas hingga tidak sinkronnya antar dinas atau instansi. Soal dana memang bedah rumah membutuhkan dana yang besar, sementara ini anggaran yang ada jumlahnya terbatas. Sedangkan soal sinkronisasi, antar instansi masih belum padu. Idealnya, setelah program bedah rumah selesai, kemudian disusul program lain, misalkan jambanisasi.

“Kelemahan lainnya yaitu soal besaran nilai bantuan. Sebelumnya, bantuan hanya Rp10 juta. Ini cukup memberatkan bagi pemilik rumah maupun warga sekitar. Untuk itu saat ini sudah dinaikkan jadi Rp15 juta. Ke depan, DPRD mendorong terus



meningkat, Rp20 juta hingga Rp25 juta tiap rumah.” (Wawancara anggota DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso)

Selanjutnya, apa dampak program bedah rumah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka kemiskinan di Kulon Progo masih cukup tinggi, yakni sebesar 21 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan hanya 0,3 persen. Kendati begitu, Bupati Hasto Wardoyo memiliki argument sendiri dalam merespon data tersebut. Menurutnya pemerintah pusat tidak tepat dalam menentukan standar dalam mengukur angka kemiskinan di Kulon Progo. Dalam survey tahun lalu, pemerintah pusat menetapkan standar pendapatan yang cukup tinggi yakni Rp 311.000. Standar tersebut jauh berbeda dengan daerah lain, misalkan di Gunung Kidul yang hanya sebesar Rp270.000. Jika standar penghitungan disamakan dengan Gunung Kidul, maka Hasto mengklaim jika angka kemiskinan di Kulon Progo turun drastis menjadi 16 persen.

## **KESIMPULAN**

Dalam kampanye Pilkada tahun 2017 lalu, isu program anti kemiskinan cukup menonjol disampaikan pasangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo. Program anti kemiskinan tersebut sebenarnya ‘keberhasilan’ pelaksanaan program sebelumnya. Seperti diketahui, pasangan ini merupakan incumbent yang ingin kembali meraih kursi bupati dan wakil bupati untuk periode ke dua. Seperti prediksi awal, kampanye kesuksesan program anti kemiskinan ini berhasil mengantarkan Hasto dan Sutedjo memenangi Pilkada tahun 2017 lalu. Pada Pilkada tersebut, pasangan yang diusung PDI-P, PAN, Golkar, PKS, Nasdem dan Hanura tersebut mampu meraih 220.643 suara atau 85,6 persen. Sedangkan lawannya, Zuhadmono-Iriani hanya berhasil mengumpulkan 36.874 suara, atau 14,4 persen saja.

Salah satu kebijakan anti kemiskinan yang didengungkan dalam masa kampanye adalah program bedah rumah. Program ini sebenarnya sudah dilakukan Bupati Hasto sejak masa pemerintahan periode pertama. Yang berbeda, program bedah rumah ini tidak mengandalkan anggaran pemerintah (APBD maupun APBN), melainkan bersumber dari swasta dan zakat PNS. Selama 5 tahun berkuasa, sudah ada 6 ribu rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Hampir setiap tahun ada sekitar 1.000 rumah yang diperbaiki. Dalam

program ini, penerima bantuan mendapatkan dana Rp10 juta hingga Rp15 juta. Anggaran itu berasal dari CSR perusahaan swasta maupun BUMD di Kabupaten Kulon Progo. Sumber lainnya, program bedah rumah ini juga didanai dari zakat PNS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (Bazda) Kulon Progo.

Berdasar data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemda Kulon Progo, cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017 baru mencapai 90,74 persen dan cakupan layanan rumah layak huni terjangkau yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 70 persen pada tahun 2017 baru mencapai 30, 35 persen. Sedangkan penanganan lingkungan sehat perumahan telah berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9.422 unit rumah dari total rumah 112.038 rumah di tahun 2017. Perbaikan rumah tidak layak huni tersebut melalui program yang melibatkan lintas sektoral.

Namun apakah program anti kemiskinan tersebut berdampak signifikan mengurangi jumlah warga miskin di Kulon Progo? Berdasarkan data BPS tahun 2017, angka penduduk miskin di kabupaten tersebut masih cukup besar, yakni mencapai 21 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan masih sekitar 0,3 persen. Lepas dari soal standar yang jadi acuan dalam pendataan warga miskin di Kulon Progo, pemda setempat masih harus bekerja keras dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adul Wahab, Sholichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.1997
- Chadwik, Bruce A :*Metode Penelitian Ilmu Sosial* diterjemahkan dicetak oleh IKIP Semarang Press cetakan pertama 1991
- Dunn, William N :*Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition Second Edition dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua – Yogyakarta* by Gadjah Mada University, 2002
- Fermana Surya :*Kebijakan Publik : Sebuah tinjauan Filosofis* . Yogyakarta.PT. Ar-Ruzz Media, 2009
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992

- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Parsons, Wayne : Public Policy: Pengantar Teori & Praktis Analisis Kebijakan Jakarta : Kencana 2005
- Ratminto & Atik Septi W. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005
- Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah-Asih-asuh, Malang, 1990
- Setijaningrum. Erna : *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya. PT. Revka Petra Media. 2011
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasinya* Jakarta. Bumi Aksara. 2006
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*, Bayumedia Publishing Malang. 2007
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. PT. Buku Seru 201